



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN BERIKAT: URGENSI ADAPTASI REGULASI TERHADAP DINAMIKA PASAR

**Yiyis Aldi Mebra**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[yiyis.mebra@dpr.go.id](mailto:yiyis.mebra@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pengelolaan kawasan berikat di Indonesia tengah menghadapi tantangan struktural yang memerlukan penanganan kebijakan yang lebih holistik dan adaptif. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi XI DPR RI dan Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Cabang Jawa Timur Raya, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara intensitas pengawasan otoritas kepabeanan dan tingginya angka kebocoran di kawasan berikat. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan beban regulatif ganda bagi pelaku usaha, di satu sisi harus mematuhi regulasi pengawasan yang ketat, namun di sisi lain harus berkompetisi dalam lingkungan usaha yang masih diwarnai praktik-praktik tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan ini diperparah dengan keterbatasan akses pasar domestik bagi perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan berikat. Banyak pelaku usaha mengeluhkan rigiditas kebijakan yang menghambat proses penjualan produk ke pasar dalam negeri, sementara beberapa perusahaan bahkan mengalami pembekuan aktivitas operasionalnya. Ketidaksesuaian antara regulasi dan kebutuhan industri ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang mengancam keberlanjutan operasional dan efisiensi bisnis kawasan berikat, terutama di tengah fluktuasi permintaan ekspor global. Dalam konteks ini, rendahnya fleksibilitas peraturan terkait penjualan domestik menjadi faktor struktural yang secara signifikan menghambat kapasitas adaptif perusahaan terhadap dinamika pasar.

Lebih lanjut, tekanan ekonomi yang dialami oleh pelaku usaha di sektor kawasan berikat telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal. Ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan akibat tekanan regulasi dan ketiadaan respons kebijakan yang adaptif berpotensi memicu krisis ketenagakerjaan yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sosial-ekonomi nasional. Dalam konteks lesunya permintaan ekspor global, pembukaan ruang bagi penjualan domestik menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat daya tahan industri dan menjaga kesinambungan lapangan kerja.

Di sisi lain, kebijakan kawasan berikat dan *tax holiday* pada dasarnya merupakan instrumen strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan berikat memberikan keunggulan kompetitif melalui pembebasan bea masuk atas barang modal dan bahan baku, yang pada gilirannya mampu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Sementara itu, *tax holiday* memberikan insentif fiskal melalui pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan dalam jangka waktu tertentu, yang dirancang khusus untuk sektor-sektor prioritas seperti industri manufaktur dan teknologi tinggi.

Kombinasi antara fasilitas kawasan berikat dan *tax holiday* berperan dalam membentuk iklim investasi yang kondusif, menarik arus modal asing, serta mendorong terjadinya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kualitas implementasinya di lapangan. Untuk itu, diperlukan

pendekatan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara fungsi pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas dengan pemberian ruang fleksibilitas operasional yang memungkinkan pelaku usaha merespons dinamika pasar secara efisien.

Dalam jangka pendek, kebijakan relaksasi untuk memperluas akses penjualan ke pasar domestik dapat menjadi alternatif solusi yang relevan, khususnya dalam menghadapi tekanan eksternal seperti perlambatan ekspor. Namun demikian, kebijakan tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menciptakan distorsi pasar, khususnya bagi perusahaan di luar kawasan berikat yang tidak menikmati insentif serupa. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan kesetaraan perlakuan dalam ekosistem industri nasional harus tetap menjadi landasan dalam perumusan kebijakan yang bersifat reflektif maupun struktural.

## Atensi DPR

DPR RI perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan kawasan berikat guna menjamin terciptanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan kebutuhan fleksibilitas operasional bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, Komisi XI DPR RI berperan strategis dalam mendorong pemerintah untuk segera merumuskan langkah-langkah responsif jangka pendek yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global, termasuk opsi relaksasi terbatas terhadap akses pasar domestik secara berkeadilan. Pengawasan intensif terhadap koordinasi antar-kementerian, khususnya antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menjadi esensial untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Selain itu, Komisi XI DPR RI harus menjamin bahwa kebijakan relaksasi yang diterapkan mengedepankan asas keadilan guna menghindari distorsi persaingan antara pelaku usaha di dalam dan di luar kawasan berikat, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam proses evaluasi dan revisi regulasi kawasan berikat.

## Sumber

emedia.dpr.go.id, 22 Mei 2025;  
match.co.id, 22 Mei 2025; dan  
sfl.co.id, 22 Mei 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
M. Insan Firdaus  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*